

NASKAH PUBLIKASI

PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA

DI DESA KAIBON KECAMATAN AMBAL

KEBUMEN JAWA TENGAH

(Kajian Pasal 78 S/d Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan

Guna Meraih Derajat Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan



Oleh :

Robby Ismawan

1500024134

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2019

JOURNAL
THE ROLE OF HEADMAN AND VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY
IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DEVELOPMENT IN
KAIBON VILLAGE AMBAL SUB-DISTRICT
KEBUMEN JAWA TENGAH

(A Study of the Article 78 to 82 Law Number 6 Year 2014)

THESIS

This Thesis Submitted As A Fulfillment Of The Requirements To Attain The
Bachelor Degree Of Legal Studies



By :

Robby Ismawan

1500024134

FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2019

**PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA
DI DESA KAIBON KECAMATAN AMBAL
KEBUMEN JAWA TENGAH**

(Kajian Pasal 78 S/d Pasal 82 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

Robby Ismawan

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pasal 78 S/d Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Kaibon, untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan Pembangunan Desa, dan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam melaksanakan Pembangunan Desa di Desa Kaibon.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara deskriptif, data dikumpulkan dan dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh sehingga didapatkan jawaban atas permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian adalah Kepala Desa dan BPD belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya pada pembangunan Desa, terlebih dalam hal ini peran BPD sangat lemah dan seluruh kegiatan Pemerintahan Desa dikendalikan oleh Kepala Desa. Hambatannya adalah kurangnya pengetahuan dari BPD terkait fungsi dan tugasnya, kurang pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan BPD dan kurangnya koordinasi antar kepala Desa, BPD dan masyarakat. Upaya yang harus dilakukan adalah peningkatan SDM BPD, sosialisasi terkait pembangunan Desa dan koordinasi.

Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Peran BPD, Pembangunan Desa.

**THE ROLE OF HEADMAN AND VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY
IN THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE DEVELOPMENT IN
KAIBON VILLAGE AMBAL SUB-DISTRICT
KEBUMEN JAWA TENGAH**

(A Study of the Article 78 to 82 Law Number 6 Year 2014)

Robby Ismawan

ABSTRACT

This study aimed was to find out the role of Headman and Village Consultative Agency in implementing Article 78 to 82 Law Number 6 about Village and the village development in Kaibon, to find out the obstacles in implementing the village development, and to find out the effort made to overcome the obstacles happen in implementing the village development in Kaibon.

The type of study was qualitative study. Data collected will be analysed descriptively, data was collected and connected to the theories were obtained so get the answer of the research problem. Data collecting technique was using interview and observation.

Result of this study shown that the Headman and Village Consultative Agency was not maximal yet in doing their duties in village development, especially in this case the role of Village Consultative Agency was very weak and all the village government activities were controlled by the Headman. The obstacles were the lack of knowledge from Village Consultative Agency about the function and duty, the lack of society knowledge about the role of Village Consultative Agency and the lack of coordination between the Headman, Village Consultative Agency and society. The efforts that have to be done are to improve the human resources of Village Consultative Agency, the socialization about the village development and coordination.

Keywords: The Role of Headman, The Role of Village Consultative Agency, Village Development

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum.

Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada masa pemerintahan sebelum reformasi, masalah otonomi daerah memang belum ada operasionalisasi yang nyata; masalah otonomi daerah hanya sekedar konsep, meskipun telah ada perundang-undangan yang mengatur.

Penetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan memiliki titik awal dari proses reformasi di bidang pemerintahan; khususnya mengenai pemerintahan di daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, yaitu asas penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah ini adalah desa tidak lagi merupakan wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksanaan daerah, tetapi desa telah menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya di lingkungan masyarakatnya (HAW. Widjaya, 2003:37).

Sejak adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjadikan posisi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan hak asal-usul desa, sehingga otonomi desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ayat diatas menjelaskan bahwa setiap desa berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Yang dimaksud untuk mengatur urusan pemerintahan ada pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”. Jadi yang berwenang adalah

pemerintah desa, yakni Kepala Desa dibantu Perangkat Desa, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian, unsur lain yang dimaksudkan disini adalah Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Desa menyatakan “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”. Badan Permusyawaratan Desa salah satu lembaga yang ikut serta mewujudkan adanya demokrasi dan pembangunan di suatu daerah atau desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi dan peran dalam pemerintahan untuk menentukan kebijakan dan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa. Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terbentuk Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu, fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi masyarakat untuk pembangunan Desa.

Pemerintahan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, yakni Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya yang membantu. Kepala Desa mempunyai tugas, yakni menyelenggarakan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam hal ini pemerintah Desa melaksanakan kegiatan pemerintahan dan diawasi oleh BPD. BPD dan Kepala Desa memiliki peran penting dalam mencapai tujuan Desa.

Berbicara tentang pembangunan, menurut Siagian (1994) pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building). Pembangunan terbagi menjadi tiga, yaitu pembangunan nasional, pembangunan daerah dan pembangunan desa.

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas dalam mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pembangunan nasional Negara Indonesia salah satunya sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum yang dimaksud adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Berbeda dengan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bangsa Indonesia, Pembangunan daerah merupakan proses dimana pemerintah

daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru selain itu juga merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 dalam Santoso, 2013).

Bagian yang tidak bisa dipisahkan terhadap pembangunan nasional dan daerah adalah pembangunan desa. Pembangunan desa memiliki peran penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional maupun sebagai sebuah lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara. Keberadaan desa yang sangat strategis yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan mendukung program pembangunan yang diberikan.

Tujuan dari pembangunan desa telah dijelaskan pada Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu :

- (1) Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dana kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Seperti yang tertera pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjelaskan bahwa seluruh pembangunan desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengentaskan dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Perencanaan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal 78 telah dijelaskan dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa “Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota”. Seluruh rencanan pembangunan desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan mengacu pada perencanaan yang dilakukan Kabupaten/ Kota. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa, Pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa.

Kemudian, pelaksanaan Pembangunan Desa dijelaskan pada Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dikatakan bahwa “pelaksanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa”. Pembangunan Desa dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan sifat kekeluargaan yang bergotong royong.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa tentu ada pemantauan dan pengawasan yang dilakukan. Dalam pemantauan dan pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan dilaporkan kepada lembaga pengawasan yang bernama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Seperti

yang dinyatakan dalam Pasal 82 Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tentang Desa “Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa”.

Pembangunan desa merupakan suatu proses dalam rangka meningkatkan kemampuan dari penduduk desa itu sendiri dalam segala aspek baik sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya, disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat desa itu sendiri.

Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (*Centre of excellent*). Masih minimnya prasarana social ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan yang relatif masih rendah.

Dalam rangka pembangunan desa yang menyeluruh, terpadu dan terprogram, untuk mencapai sasaran dan tujuannya diperlukan kerjasama Kepala Desa beserta perangkat desa, BPD dan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk mengangkat penelitian skripsi dengan Judul: **“PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAIBON KECAMATAN AMBAL KEBUMEN JAWA TENGAH (Kajian Pasal 78 S/d Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjabaran serta pemaparan latar belakang diatas adapun rumusan masalah yang akan penulis uraikan di dalam pembahasan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa berdasarkan Pasal 78 S/d Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kaibon Kecamatan Ambal Kebumen Jawa Tengah ?
2. Apakah hambatan dalam pelaksanaan Pembangunan Desa atau Pelaksanaan Pasal 78 S/d Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kaibon Kecamatan Ambal Kebumen Jawa Tengah ?
3. Upaya apakah yang dilakukan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan Pasal 78 S/d Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Kaibon Kecamatan Ambal Kebumen Jawa Tengah ?

C. PERAN KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA BAIK PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA KAIBON

1. Rancangan Peraturan Desa

BPD dan Kepala Desa mengajukan rancangan peraturan desa kemudian dibahas bersama-sama di dalam Musyawarah BPD serta menyepakati jumlah anggaran yang dirancang oleh kepala Desa. Setelah

mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Untuk menetapkan peraturan desa, BPD dan kepala desa memiliki peran yang sangat penting antara lain sebagai berikut :

- a. BPD menyetujui dikeluarkannya Peraturan Desa
- b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut
- c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang baru ditetapkan
- d. BPD mengesahkan APBDes
- e. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat di tiap-tiap dusun untuk diketahui dan dipatuhi serta ditetapkan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

BPD memiliki kewenangan dalam menjaring aspirasi sebagai proses awal perencanaan peraturan desa diantaranya dalam tahap awal proses perencanaan dan penganggaran, yaitu dengan diselenggarakannya Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai dasar demokratisasi..

Selain BPD, Kepala Desa memiliki peran penting dalam pembentukan Peraturan Desa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yakni :

“Kepala Desa berwenang dan berhak mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.”

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Desa dibutuhkan kerja sama antar elemen di Desa, yakni Kepala Desa, Badan Permusyawaratan

Desa dan partisipasi dari masyarakat agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Hasil wawancara dari salah satu masyarakat di Desa Kaibon :

“Dalam musyawarah Desa yang lebih aktif malah kepala Desa, yg memimpin juga kepala Desa, seperti mengikuti alur Kepala Desa. BPDnya kurang berperan, hanya datang duduk dan memperhatikan musyawarah.” (Slamet, 20 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka disimpulkan bahwa dalam Rancangan Peraturan di Desa Kaibon peran Kepala Desa yang berperan dan berpengaruh terhadap Rancangan Peraturan Desa yang dibuat dalam Musyawarah Desa.

2. Perencanaan Pembangunan Desa

Menurut Pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Tentang Desa Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan :

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Dalam melakukan Pembangunan Desa meliputi 3 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sebelum melaksanakan pembangunan Desa, ada yang seharusnya diperhatikan terlebih dahulu, yaitu perencanaan. Menurut Bintaro (1983:2) tujuan perencanaan pembangunan agar pembangunan terselenggara secara berencana, yaitu secara sadar, teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gojolak-gejolak di dalam

pelaksanaannya. Agar upaya-upaya yang dilakukan untuk pembangunan dapat berhasil mencapai sasaran, maka pengarahannya untuk pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada perlu berpedoman pada suatu rencana yang terwujud dalam suatu bentuk perencanaan pembangunan.

Menurut Bintoro (1987:12) menyatakan bahwa : a. Perencanaan dalam arti seluas-luasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. b. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimal output) dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan efisien. c. Perencanaan adalah penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilaksanakan, bagaimana, bilamana, dan pada siapa. d. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahannya penggunaan sumber sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu tugas pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia

Nomor 114 Tahun 2014 yang berbunyi :

“Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.”

Kepala Desa dan BPD memiliki peran yang sangat strategis dalam perencanaan Pembangunan Desa. Selain itu, perencanaan pembangunan desa wajib mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam hal ini peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting karena menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan Pembangunan Desa untuk menyampaikan aspirasi yang dimiliki untuk kepentingan pembangunan Desa. Aspirasi masyarakat kemudian diwadahi oleh BPD dan disampaikan BPD dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Selain menjadi wadah bagi masyarakat, fungsi BPD dalam Perencanaan Pembangunan Desa adalah mengawasi kinerja Kepala Desa dan jajarannya.

Menurut salah satu anggota BPD Desa Kaibon, mengatakan bahwa :

“Untuk keikutsertaan anggota BPD dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa memang masih kurang, masih ada beberapa anggota yang tidak datang. Jangankan anggota terkadang ketika ada rapat atau musyawarah semacamnya ketua BPDnya pun tidak hadir. Semua musyawarah masih dipegang kendali oleh kepala desa langsung.” (Nur Salim, 20 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, maka penulis menyimpulkan bahwa peran BPD terhadap perencanaan di Desa Kaibon masih kurang maksimal dan Peran kepala Desa dalam perencanaan Pembangunan di Desa Kaibon sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Hal ini ditunjukkan dengan hasil wawancara langsung dari anggota BPD Desa Kaibon. Dari yang dilihat langsung oleh penulis bahwa Ketua BPD yang belum menjalin komunikasi baik dengan anggotanya.

Untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, yakni Pemerintah Desa dan BPD, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan mendapat dukungan dari masyarakat.

3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. BPD adalah lembaga yang ada di Desa yang memiliki tugas dan fungsi strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan pembangunan Desa apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat strategis dalam kaitannya dalam Pembangunan Desa, karena BPD memiliki kaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan. BPD secara langsung dapat

mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat di Desa dan dapat membantu Pembangunan Desa.

Berdasarkan pernyataan Ketua RW Desa Kaibon bahwa :

“BPD di Desa Kaibon memiliki kedudukan yang sama dengan Pemerintah Desa, namun untuk tugas dan wewenangnya belum berjalan dengan baik. Segala urusan penyelenggaraan pemerintahan Desa sudah mengikuti Undang-Undang yang berlaku.”(Makun, 09 Agustus 2019)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki keterkaitan dengan Pemerintah Desa yakni Kepala desa serta jajarannya. Dalam melaksanakan pemerintahan Desa, BPD dan Pemerintah Desa harus dapat memiliki komunikasi yang baik untuk mencapai tujuan Desa tersebut.

Dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah dijelaskan tentang pembangunan desa, yang berbunyi :

“Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pembangunan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Pembangunan desa yang dimaksud adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan gotongroyong antar pemerintah Desa, BPD dan masyarakat Desa tersebut. Peran BPD dalam pembangunan Desa sangat penting, terlihat dari fungsi BPD itu sendiri bahwa BPD memiliki fungsi mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kehadiran BPD dalam Pemerintahan Desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya

diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balance* dalam pemerintahan desa. Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Kepala Desa dan BPD bekerja sama dalam mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Dalam menjalankan fungsi BPD sebagai badan legislatif desa dan wadah aspirasi masyarakat diharapkan dapat tercapai dengan baik dan efektif. Dengan kata lain pemerintah desa dan BPD dapat bersinergi dengan baik dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan adanya dukungan dari masyarakat. Dalam menjalankan peran BPD untuk mencapai tujuan pembangunan Desa maka, diharapkan BPD mampu menjalankan fungsinya dengan baik.

Berikut adalah peran BPD untuk melaksanakan Fungsi BPD dalam Pembangunan Desa di Desa Kaibon, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga baru yang hadir dalam pemerintahan desa pada era otonomi daerah di Indonesia dan pada implementasinya memiliki fungsi sebagai parlemen di desa. Fungsi utama BPD adalah membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Peraturan Desa ialah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan berpedoman dari peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah dan kepentingan umum. Selain itu, dalam penyusunan peraturan desa tetap memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa tersebut dalam upaya mencapai tujuan pembangunan desa. Peraturan Desa kemudian ditetapkan oleh kepala desa dan diumumkan dalam berita desa yang dibuat baik sebagai pelaksanaan/penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.

Perumusan Peraturan desa layak dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Rancangan peraturan desa baik yang disiapkan oleh BPD maupun oleh Kepala Desa, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada seluruh anggota
- b. BPD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum rancangan peraturan desa tersebut di bahas dalam rapat.
- c. Pembahasan rancangan kepala desa dilakukan oleh BPD bersama kepala desa.
- d. Rancangan dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh BPD dan kepala desa.

- e. Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD dengan Kepala desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung tanggal penetapan bersama.
- f. Rancangan Peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- g. Peraturan desa berlaku setelah diundangkan dalam berita desa.

Berdasarkan pernyataan Anggota BPD Desa Kaibon, bahwa :

“Peran BPD dalam mengadakan Musyawarah Desa cukup baik, namun dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Desa untuk pembangunan desa, peran BPD masih kurang baik. Hal ini karena kurangnya pengetahuan dari anggota BPD itu sendiri.” (Nur Salim, 12 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengamatan langsung dilapangan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa peran BPD di Desa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa masih sangat kurang. Hal ini didasarkan karena masih kurangnya pengetahuan dari setiap anggota BPD di Desa Kaibon untuk menjalankan fungsinya.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa

setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan desa merupakan produk politik yang dimiliki Desa. Hal ini membuat peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yang artinya seluruh proses penyusunannya dapat melibatkan partisipasi masyarakat sekitar. Dalam hal ini masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan dan memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan salah satu upaya yang wajib dilakukan untuk pembangunan Desa di Desa Kaibon.

Berdasarkan pernyataan Ketua RW, bahwa :

“Seharusnya dengan adanya Perwakilan Rakyat yaitu BPD, dapat mewujudkan cita-cita masyarakat untuk memiliki peraturan desa yang mampu membangun Desa Kaibon. Namun, sayangnya peran BPD di Desa Kaibon masih sangat kurang. Dalam musyawarah Desa pun, BPD kurang memperlihatkan perannya, masih ada beberapa anggota yang tidak datang saat Musyawarah Desa, yang datang pun hanya duduk diam tidak menyampaikan aspirasinya atau pendapatnya.” (Makun, 09 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran BPD di Desa Kaibon sangat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari tindakan yang dilakukan BPD di Desa Kaibon yang masih kurang dalam menjalankan fungsinya dan tugasnya. Seharusnya kehadiran BPD dapat membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa. Seperti halnya yang dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa :

“Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.”

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang tersebut, terlihat bahwa peran BPD dalam pembangunan Desa sangat penting. Hal ini dikarenakan masyarakat menyampaikan aspirasi dan segala pendapatnya kepada BPD kemudian disampaikan kepada Pemerintah Desa.

Secara konseptual, keterkaitan antara Pemerintah Desa dan BPD lebih pada check and balance yang mana pada intinya merupakan suatu mekanisme saling control di antara lembaga desa demi menghindari terjadinya penyimpangan kekuasaan dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif pembagian kekuasaan BPD merupakan badan legislatif desa yang berfungsi sebagai pembuat peraturan desa, wadah bagi aspirasi masyarakat dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa sedangkan kepala desa merupakan badan eksekutif yang berfungsi sebagai pelaksana peraturan desa.

b. Menampung dan menyalurkan Aspirasi masyarakat

Fungsi ke dua Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan Desa adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD dalam hal ini menjadi wadah bagi masyarakat Desa yang memiliki ide, pendapat atau aspirasi kemudian di salurkan kepada pemerintah Desa guna untuk mewujudkan pembangunan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.

Berdasarkan hasil wawancara Masyarakat Desa Kaibon, bahwa :

“Aspirasi dari masyarakat kurang di dengar dan terkadang tidak disampaikan langsung kepada Kepala Desa. Masyarakat desa pun masih banyak yang belum tahu tentang tugas dan fungsi BPD itu sendiri. Jadi kalau untuk hubungan antara masyarakat dan BPD di Desa Kaibon masih sangat kurang.” (Tugijan, 15 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan hasil pengamatan langsung di lapangan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa masalah yang terjadi adalah kurangnya komunikasi antar kepala desa, BPD dan masyarakat terkait pembangunan Desa. Seperti yang terlihat di lapangan bahwa masih banyak yang tidak mengerti siapa yang menduduki kursi BPD dan apa fungsi dan tugas BPD itu sendiri. Hal ini sangat disayangkan karena pada dasarnya fungsi dari BPD ialah menyalurkan, menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kepala desa.

Berdasarkan pernyataan Ketua RW Desa Kaibon, bahwa :

“Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kaibon sendiri, masih adanya permainan politik didalamnya. Seperti dalam pelaksanaan peran dari BPD itu sendiri, BPD yang kurang aktif tidak mendapat teguran atau semacamnya dari pemerintah desa maupun masyarakat. Ketua BPD dan kepala desa masih memiliki status keluarga yang membuat keduanya *kongkalikong* untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.” (Makun, 20 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa adanya permainan politik dalam pemerintahan desa di Desa Kaibon yang membuat kurangnya peran dari BPD untuk pembangunan Desa di Desa Kaibon. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 telah diatur bahwa fungsi BPD adalah melakukan penggalian aspirasi masyarakat, yakni penggalian aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, dan kelompok marjinal. Selanjutnya hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam Musyawarah BPD.

Menurut salah satu masyarakat yang ada di Desa Kaibon mengatakan bahwa :

“Masyarakat disini sudah cukup membantu dalam pembangunan Desa, sudah banyak masyarakat yang selalu andil ketika ada kegiatan-kegiatan pembangunan di Desa walaupun beberapa ada yang masih kurang peduli dengan perkembangan desa. Memang masih ada masyarakat yang belum tau keberadaan BPD itu sendiri. karena pengetahuan dari masyarakat yang kurang terhadap BPD, BPD sendiri pun tidak menawarkan diri kepada masyarakat disini.” (Poniran, 20 Agustus 2019)

Dalam hal ini, menurut penulis permasalahan ada pada BPD itu sendiri, karena belum mewadahi aspirasi-aspirasi masyarakat di Desa Kaibon dan masih kurangnya diadakan Musyawarah BPD guna menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat. Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di Desa Kaibon adalah kurangnya

komunikasi dan pemahaman terkait hak, kewajiban, fungsi dan wewenang dari pemerintah Desa, BPD dan juga masyarakat itu sendiri. Pada pembangunan Desa, peran BPD diharapkan sangat membantu dikarenakan tugasnya yang menjadi pengawas dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang dilakukan kepala desa dan jajarannya.

Badan Permusyawaratan Desa menjadi wakil rakyat di desa merupakan tempat bagi masyarakat untuk menampung segala keluhan-keluhan yang dirasakan dan ditindak lanjuti keluan atau aspirasi tersebut untuk disampaikan kepada pemerintah Desa yang menyelenggarakan Pembangunan Desa.

Banyak cara yang dilakukan untuk menampung segala keluhan-keluhan yang kemudian ditindak lanjuti yaitu dengan cara tertulis dan secara lisan. Cara tertulis misalnya masalah-masalah tersebut terkait dengan pembangunan dan kemajuan desa maka akan dibahas dan dibicarakan lebih lanjut dalam bentuk peraturan-peraturan desa, dan dengan cara lisan yaitu masyarakat menyampaikan aspirasinya langsung kepada BPD pada saat ada pertemuan desa atau rembug desa dan ketika ada rapat BPD (Ibid, 173).

Peran BPD dalam meningkatkan pembangunan desa dapat dilakukan dengan selalu melihat situasi dan kondisi yang ada pada Desa Kaibon tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat serta

melakukan musyawarah evaluasi dalam bidang pembangunan bersama Kepala Desa dan jajarannya.

c. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pemerintahan Desa secara yuridis terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa memiliki fungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kepala Desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa kepada Bupati/Walikota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa memiliki lembaga yang mampu menciptakan check and balances dalam pembangunan desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah Desa oleh Kepala Desa adalah BPD hal tersebut diatur dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 huruf (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk menjamin bahwa tujuan dapat tercapai. Sistem pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan

Desa berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku badan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa serta jajarannya diharapkan mampu menjadi pengawas yang dapat memantau penyelenggaraan Pemerintahan Desa sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan sesuai tujuan dan dapat mandiri serta bebas dari campur tangan dari pihak-pihak yang menyampingkan kepentingan umum.

Dalam menjalankan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa di desa kaibon guna mendukung pembangunan desa diharapkan BPD dapat melaksanakan fungsinya demi tercapainya tujuan desa tersebut.

Berdasarkan pernyataan Ketua RW desa Kaibon, menyatakan bahwa :

“Kalau yang saya lihat, peran BPD terhadap pengawasan terhadap kinerja kepala desa masih sangat kurang, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa masih adanya permainan politik didalam pemerintahan di desa ini. Kepala desa dan ketua BPD memiliki hubungan keluarga sehingga ketua BPD dalam menjalankan tugasnya masih kurang.” (Makun, 09 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam pengawasan BPD terhadap kinerja kepala desa masih memiliki hambatan. Hambatan-hambatan tersebut salah satunya karena masih adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam pemerintahan di Desa Kaibon tersebut, selain itu kualitas pendidikan yang rendah pun menjadi masalah karena BPD di Desa Kaibon rata-rata memiliki pendidikan yang rendah. Pendidikan yang

rendah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman-pemahaman dari anggota BPD tersebut untuk menjalankan fungsinya.

Pernyataan dari salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kaibon :

“Anggota BPD di Desa ini termasuk saya, masih memiliki banyak kekurangan terutama dibidang pendidikan. Hal-hal seperti ini yang membuat BPD di Desa Kaibon belum jelas dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu juga banyak dari anggota BPD yang masih bingung terhadap fungsinya.” (Nursalim, 23 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut, dijelaskan bahwa selain pendidikan dan pemahaman yang kurang, ternyata masih banyak anggota BPD itu sendiri yang belum paham akan fungsinya.

Permasalahan ini memang menjadi ironi sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Kaibon. Badan Permusyawaratan Desa yang seharusnya mengawasi kinerja Kepala Desa sehingga dapat melihat kekurangan dari kinerja dalam pembangunan desa, namun hal ini belum maksimal dilakukan oleh BPD di Desa Kaibon.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut maka di tempuh dengan cara meningkatkan kemampuan (pengetahuan dan wawasan) dengan membentuk dan menghidupkan mengikuti forum-forum tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, membentuk dan menghidupkan forum-forum warga di luar forum formal pemerintahan yang sudah ada guna mendukung dan memperbaiki serta tata kerja kelola pemerintahan

desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalin hubungan antara Pemerintah Desa dengan warga masyarakat desa.

Seperti di uraikan di atas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan besar dalam hal pengawasan bagi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar selalu dapat berjalan dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pembangunan desa, BPD diharapkan mampu mengawasi kinerja Kepala Desa dan perangkat desa lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan Desa.

Seperti yang dijelaskan diatas tentang Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa yang belum maksimal dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, dalam hal lain Kepala Desa juga memiliki peran yang erat dan berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa tentang pelaksanaan Pembangunan Desa di Desa Kaibon. Kepala Desa dan BPD memiliki peran yang sama-sama penting dan berkaitan dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

“Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.”

Kepala desa melaksanakan tugasnya dengan mengoordinasikan kegiatan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Kemudian dalam berjalannya

pelaksanaan pembangunan desa, Kepala Desa Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kaibon belum terjalin kerjasama yang baik antara Kepala desa dengan anggota BPD sehingga dalam pelaksanaan Pembangunan Desa belum mencapai tujuan dengan maksimal.

4. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa

Menurut Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatakan bahwa :

“Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa”

Hal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Desa, yang berhak melaksanakan pemantauan adalah masyarakat desa. Selanjutnya dikatakan pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa :

“Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.”

Dalam Pembangunan Desa, masyarakat memiliki hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Masyarakat dapat memantau dan memberikan keluhan yang dirasakan pada pelaksanaan pembangunan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kemudian BPD

menyampaikan keluhan masyarakat kepada pemerintah Daerah dan akan di evaluasi dalam Musyawarah BPD.

Salah satu masyarakat Desa Kaibon mengatakan bahwa :

“Beberapa masyarakat memang masih ada yang belum mengetahui keberadaan BPD di Desa ini, masih banyak juga yang belum paham tugas dan kewajiban mereka sebagai masyarakat.”
(Budiono, 23 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan yang dilihat secara langsung, penulis menyimpulkan bahwa masyarakat di Desa Kaibon masih kurang kepeduliaannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kaibon. Hal ini terlihat dengan hal-hal yang dilakukan masyarakat di Desa Kaibon seperti lebih mementingkan hal yang lain. Permasalahan yang ada di Desa Kaibon terjadi karena kurangnya pengetahuannya terhadap hak dan kewajiban masyarakat itu sendiri. Permasalahan ini dapat mengakibatkan peran masyarakat akan kurang terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan di Desa itu sendiri.

Hasil wawancara dengan Kepala RW, bahwa :

“Masalah masyarakat di Desa Kaibon sebenarnya karena kurang peduli dan jalannya pemerintahan di Desa ini juga belum sepenuhnya berjalan semestinya. seperti masyarakat yang belum tau kalau mempunyai hak untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.” (Makun, 19 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa masyarakat di Desa Kaibon masih belum paham dengan kewajiban dan hak nya sebagai masyarakat. Peran masyarakat dalam pemantauan di Desa Kaibon menjadi

tidak berjalan seperti semestinya. Kurangnya komunikasi, sosialisasi dan kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan yang kurang maksimal dan membuat pembangunan desa menjadi terhambat.

Dalam pengawasan Pembangunan Desa dijelaskan dalam Pasal 46 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu :

“Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui : a. perencanaan kegiatan pemerintah Desa. b. pelaksanaan kegiatan; dan c. Pelaporan penyelenggaraa pemerintahan Desa.”

Pasal tersebut menjelaskan tentang peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan desa, BPD mampu melaksanakan fungsinya dalam pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan warga di Desa Kaibon, yaitu :

“Keberadaan BPD di Desa Kaibon sebenarnya belum berpengaruh besar kepada penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan di Desa Kaibon, karena dalam menampung dan merangkul masyarakat pun BPD masih belum maksimal.” (Hartono, 25 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan pengamatan langsung dilapangan oleh penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa keberadaan BPD di Desa Kaibon belum memberi efek yang maksimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa. Salah satu fungsi dari BPD adalah

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa dan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan dan aspirasi yang dimiliki, dan peran BPD dalam hal ini adalah menyampaikan keluhan dan aspirasi dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas membuktikan bahwa kurangnya pemahaman anggota BPD itu sendiri terhadap fungsi dan tugasnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan ini adalah karena adanya hubungan pribadi dalam pemilihan anggota BPD. Di Desa Kaibon itu sendiri ketua BPD dan Kepala Desa memiliki hubungan keluarga yang mengakibatkan melonggarkan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga penulis merekomendasikan agar dalam system pemilihan BPD di evaluasi agar kedepannya menjadi lebih baik. BPD adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengawasan dalam penyelenggaraan Pembangunan Desa.

Selain Peran masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pemantauan dan pengawasan Pembangunan Desa, ada pemerintah Desa atau Kepala Desa yang juga berperan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan Desa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi :

“Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi

kepada umum dan melaporkannya dalam musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.”

Hasil Pemantauan dan Pengawasan pembangunan Desa sebagaimana menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk evaluasi kekurangan setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, evaluasi dilakukan agar pembangunan desa kedepannya menjadi lebih baik.

D. HAMBATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA KAIBON

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh di lapangan selama penelitian ada beberapa faktor yang menjadi penghambat kinerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Berikut beberapa hambatan dan kendala yang dialami oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan tugas dan fungsinya pada pembangunan Desa di Desa Kaibon :

1. Kurangnya Pengetahuan Anggota BPD terkait fungsi dan tugasnya

Badan Permusyawaratan Desa merupakan parlemen yang ada di pemerintahan Desa dan memiliki tugas dan fungsi yang cukup berat sehingga setidaknya ketika anggota BPD dilantik sudah mengetahui fungsi dan tugas yang akan di emban. Stratifikasi atau tingkat pendidikan juga dapat berpengaruh pada keberhasilan penerapan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dengan tingginya pendidikan yang dimiliki seseorang maka akan semakin tinggi tingkat analisis terhadap gejala-gejala sosial yang terjadi dalam suatu lingkup masyarakat, namun

kenyataannya bahwa tingkat pendidikan pada pengurus BPD di Desa Kaibom masih standar atau masih rendah sehingga hal inilah yang menjadi faktor penghambat di dalam menjalankan fungsinya.

Eksistensi BPD sangat dibutuhkan dalam jalannya Pembangunan Desa. BPD sangat di butuhkan karena mengingat fungsi BPD sebagai lembaga parlemen desa, dimana merupakan alat penghubung antara masyarakat dan desa.

Kurangnya pengetahuan dari Anggota BPD terkait fungsi dan tugasnya mengakibatkan kurang maksimalnya perannya dalam pembangunan Desa. Hal ini disampaikan dalam hasil wawancara bersama salah satu anggota BPD, yakni :

“Kendala sebenarnya yg utama itu kita sebagai anggota masih bingung apa yang harus dilakukan untuk kontribusi terhadap pembangunan di Desa, ketua sendiri pun diam ketika anggotanya tidak melaksanakan tugasnya.” (Hartono, 25 Agustus 2019)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak BPD adalah kurangnya pemahaman mengenai tugas pokok sebagai BPD. Hal ini sangat disayangkan karena melihat kedudukan BPD dalam pembangunan Desa memiliki peran yang penting dan dapat menunjang jalannya pembangunan desa. Faktor ini menyebabkan kurang aktif dan maksimalnya peran BPD di Desa Kaibon.

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan BPD di Desa Kaibon

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat memiliki kaitan yang erat, karena BPD merupakan wadah aspirasi sekaligus merupakan wadah perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan masyarakat dan badan-badan lainnya dalam pembangunan desa. Untuk melaksanakan fungsi BPD tersebut diatas diperlukan orang-orang yang mampu berkomunikasi dengan baik serta mampu menganalisis aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat yang selanjutnya di koordinasikan dengan Pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Desa Kaibon yakni :

“Kalau saya sendiri tau anggota BPD, tapi untuk beberapa masyarakat di Desa ini masih ada yang belum tau, jangankan fungsi dan tugasnya apa, anggotanya saja masih ada yang tidak tau.” (Tugino, 24 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dilalui BPD dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pembangunan desa adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tugas dan kewajiban dari BPD itu sendiri. Pembangunan Desa dapat berjalan dengan baik ketika adanya kerjasama yang baik antara, kepala desa, pemerintah desa, BPD dan juga masyarakat, sehingga ketiga elemen tersebut harus saling mengetahui fungsi dan tugas masing-masing.

3. Kurangnya Koordinasi antara Kepala Desa, BPD dan masyarakat

Pembangunan Desa memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta

penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa merupakan tanggung jawab semua masyarakat Desa.

Salah satu faktor yang menjadi hambatan Kepala Desa dan BPD dalam melaksanakan Pembangunan Desa adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama yang baik antara Kepala Desa, BPD dan masyarakat. Seperti yang disebutkan oleh salah satu masyarakat di Desa Kaibon :

“Dalam musyawarah desa pembahasan terkait pembangunan Desa masih kurang partisipasi dari beberapa anggota dan pemerintah Desa, masyarakat pun hanya beberapa yang menyampaikan aspirasinya.”(Tugino, 24 Agustus 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dan hasil pengamatan penulis maka dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan musyawarah desa dan pembangunan masih dipimpin oleh kepala Desa dan setiap keputusan langsung dari kepala Desa. Hal ini menyebabkan lumpuhnya peran BPD dan masyarakat yang mengakibatkan pembangunan Desa tidak akan berjalan semestinya.

E. UPAYA KEPALA DESA DAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGATASI HAMBATAN TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

Hal-hal yang dialami oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan

pembangunan Desa diperlukannya upaya untuk memperbaiki sistem yang telah berlaku di Desa Kaibon. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka didapati hasil atau upaya Kepala Desa dan BPD dalam memperbaiki hambatan-hambatan yang terjadi dalam pembangunan Desa :

1. Adanya peningkatan pengetahuan dan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal. Upaya ini dilakukan dengan melakukan pelatihan maupun penyuluhan terkait fungsi-fungsi dari BPD itu sendiri. Upaya ini dilakukan agar BPD dapat menjalankan tugasnya secara maksimal terutama untuk pembangunan Desa. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaibon meningkatkan sumberdaya manusia yang rendah dengan cara membangun jaringan dengan pihak-pihak di luar desa yang dapat memberi dampak positive. Pembangunan jaringan dilakukan dengan komunikasi secara aktif dan mendalam dengan kelompok-kelompok sumberdaya manusia yang tinggi mau menumbuhkan kesadaran di lingkungan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam bentuk penyampaian pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki sumber daya manusia yang rendah; masyarakat, media massa, maupun individu-individu yang memiliki perhatian terhadap perbaikan desa. Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai sumberdaya manusia yang tinggi mau menumbuhkan kesadaran di lingkungan anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dalam bentuk penyampaian pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang memiliki sumber daya manusia yang rendah;

2. Adanya sosialisasi yang lebih menyeluruh dan rutin kepada masyarakat terkait keberadaan serta fungsi dan tugas BPD di Desa Kaibon. Hal ini dilakukan dengan anggota BPD merangkul masyarakat dan mengajak masyarakat ketika ada musyawarah Desa, sehingga masyarakat dapat memberikan aspirasinya dalam pembangunan Desa.
3. Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengaktifkan seluruh elemen, melakukan rapat bersama agar ketika ada informasi dapat diserap oleh seluruh elemen. Kepala Desa, BPD dan masyarakat sama-sama memiliki peran yang penting dalam pembangunan Desa sehingga diperlukannya kerjasama dan koordinasi yang baik agar tercapainya tujuan dengan maksimal.

E. KESIMPULAN

1. Peran BPD di Desa Kaibon dalam menjalankan fungsinya yaitu membuat rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengawasi pemerintahan Desa masih sangat kurang maksimal. Dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kaibon masih sangat dipegang kendali oleh Kepala Desa, BPD hanya mengikuti alur dari Kepala Desa. Hal ini tetap menjadikan pembangunan di Desa Kaibon kurang maksimal dan tidak mencapai tujuannya.

2. Hambatan dalam melaksanakan pembangunan Desa didasari beberapa faktor yaitu, kurangnya pengetahuan dari anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keberadaan BPD dan kurangnya koordinasi dan kerjasama antara Kepala Desa, BPD dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa. Hambatan-hambatan ini yang menjadi kendala dalam melaksanakan pembangunan Desa di Desa Kaibon, terlihat *sepele* namun jika dibiarkan akan menghambat kesejahteraan di Desa Kaibon.
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pembangunan Desa di Desa Kaibon dengan tiga cara, yakni melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia dianggota BPD, Sosialisasi menyeluruh mengenai keberadaan BPD dan memperbanyak musyawarah antara Kepala Desa, BPD dan masyarakat agar dapat bekerjasama dengan baik untuk melaksanakan pembangunan Desa.

F. SARAN

1. Peran BPD dan Kepala Desa dalam pelaksanaan Pasal 78 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sangat penting, sehingga diharapkan BPD dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Diharapkan adanya sosialisasi tentang pemahaman tugas dan fungsi BPD agar dapat menjalankan dengan maksimal.
2. Memberikan pelatihan dan pemahaman bagi anggota BPD guna meningkatkan konseptual agar dapat menjalankan perannya dengan baik dan optimal. Perencanaan pembangunan desa sangat penting terhadap

pelaksanaan pembangunan, jadi diharapkan peran BPD dalam menjalankan fungsinya secara maksimal.

3. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa Kaibon, harus adanya kerja sama antara kepala desa, BPD dan masyarakat di Desa Kaibon. Seharusnya setiap unsur dalam pemerintahan dapat mengerti hak, kewajiban, tugas hingga fungsinya agar dapat tercapai tujuan dari pembangunan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,)

A.W. Widjaja, 1993, *Pemerintah Desa dan Adminitrasi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH UII, Jogjakarta.

HAW. Widjaya, 2003, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Jayadi Nas Kamaluddin, 2002, *Otonomi daerah dan Kepala daerah*, Makassar, Hasanuddin University Press,

Ni'matul Huda, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah*. Bandung: Penerbit Nsa Media.

-----, 2014. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.

Philipus M. Hadjon, 1998, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya,

Sirajudin, DKK, 2016. *Hukum Adminitrasi Pemerintah Daerah*. Malang : Penerbit Setara Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016

Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

C. Jurnal

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11284/BAB%20II.pdf?sequence=5&isAllowed=y>

<http://repository.uin-suska.ac.id/7121/4/BAB%20III.pdf>

http://eprints.undip.ac.id/60855/3/BAB_2.pdf

<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/548/jbptunikompp-gdl-miftahfauz-27394-3-babii.pdf>

<http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/03/memahami-subtansi-uu-nomor-6-tahun-2014.html>

Setya Retnami. Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2001. hlm.8